

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Terdapat dua Variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah

Sedangkan yang menjadi subjek penelitiannya yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat Telp./Fax (0265) 322865 Kode Pos 46151.

3.1.1 Sejarah Singkat Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibukota dari kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi kota administratif tahun 1976, pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan

kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri pada masa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu H. Suljana W.H.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini di tandai dengan pendaratan Prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu Dra. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi. Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Berkat perjuangan unsur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu H. Suljana WH beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Lhokseumawe, Langsa.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai stakeholder di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No.30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan.

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD).

Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Bp. Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif.

3.1.2 Visi Misi Kota Tasikmalaya

3.1.2.1 Visi Kota Tasikmalaya

Visi :

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

3.1.2.2 Misi Kota Tasikmalaya

Misi :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dimana penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Sedangkan metode verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini juga digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis.

Kedua metode penulisan ini dilakukan untuk mencari informasi factual, mengidentifikasi suatu masalah, melakukan tes hipotesis serta memperoleh jawaban mengenai bagaimana hubungan dari suatu variabel ke variabel yang lain.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel yaitu kegiatan menguraikan variabel menjadi sebuah variabel operasional variabel (indikator) yang langsung menunjukan pada hal-hal yang diamati atau diukur, sesuai dengan judul yang dipilih yaitu: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.”

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum. (X2)

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2009). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.(Y)

Berikut ini adalah Tabel Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Operasionalisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya realisasi PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran (Suwardi, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pajak Daerah ➤ Retribusi Daerah ➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ➤ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah <p>PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p>	Rasio
Dana Alokasi	Dana Alokasi Umum adalah dana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Besarnya DAU yang diperoleh di daerah Kota Tasikmalaya 	Rasio

Umum (X ₂)	yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Suwardi, 2015)	DAU = CF+AD
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi (Undang-Undang No 32:2014)	<p>➤ Pendapatan Asli Daerah/Bantuan Rasio Pusat Provinsi dan Pinjaman</p> $\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100 \%$

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan maka dibutuhkan data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Untuk itu penulis mengumpulkan data berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer harus mengumpulkannya secara

langsung dan teknik yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan data primer antara lain dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

2. Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data ini dijadikan pegangan oleh penulis dengan mempelajari literature yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.2.2 Periode Data yang Diteliti

Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang sesuai dengan topik penelitian. Data yang diteliti adalah data dari Tahun 2015-2020 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya

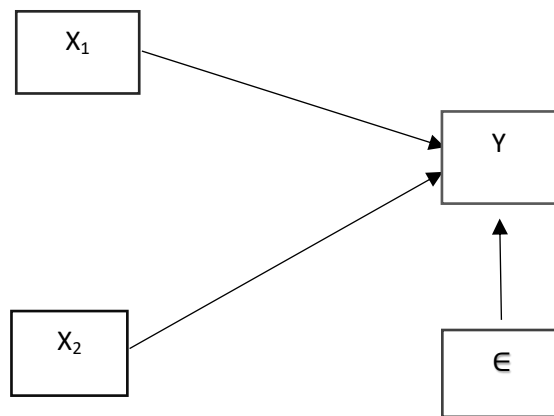
3.2.2.3 Prosedur Pengumpulan data

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis melakukan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur-literatur bidang ekonomi dan akuntansi Yang digunakan sebagai kerangka berpikir dan teori sesuai dengan topik penelitian .
2. Penelitian dokumenter yaitu dengan menelaah dan menganalisis laporan-laporan Akuntansi Sektor Publik Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nasional

3.3 Model Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” maka paradigma penelitian adalah :



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Dimana :

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

ϵ = Faktor lain yang tidak diteliti

→ = Garis pengaruh variabel X terhadap variabel Y

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah persyaratan statistik yang baru dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier, misalnya uji multikolonieritas tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi linier sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. Ada beberapa alat uji yang sering dilakukan dalam uji asumsi klasik diantaranya adalah uji multikolonealitas, uji autokorelasi, uji heteroskodastisitas, dan uji normalitas.

Jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasi digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolineritas, autokorelasi, dan heteroskodastitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi baik variabel dependen maupun independennya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi

normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji norma P Plot, Skewness dan Kurtosis atau uji KolmogorovSmirnov. Tidak ada metode yang buruk atau tidak tepat.

Pada pengujian normalitas, untuk mengetahui apakah residunya berdistribusi secara normal sesuai asumsi regresi dengan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Cara untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan rasio *skewness* atau rasio *kurtosis* dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio *skewness* adalah nilai *skewness* dibagi dengan *standard error skewness*, sedangkan rasio *kurtosis* adalah nilai *kurtosis* dibagi dengan *standard error kurtosis*. Sebagai pedoman, bila rasio *kurtosis* dan *skewness* berada diantara -2 hingga +2 maka distribusi data adalah normal

3.4.1.2 Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah terjadinya linear yang sempurna yang pasti ada perubahan-perubahan bebas. Untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolonieritas yaitu dengan cara uji korelasi yaitu dengan melihat keeratan antara hubungan dua variabel penjelas.

3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varians yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya varians yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas penaksiran OLS tetap tidak bisa tetapi tidak efisien. Untuk menentukan apakah suatu

model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, salah satunya dengan uji *Glesjer*. Uji *Glesjer* secara umum dinotasikan sebagai berikut :

$$|e| = b_1 + b_2X_2 + v$$

Dimana :

$|e|$ = Nilai Absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model

X_2 = Variabel Penjelas

Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah heteroskedastisitas.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi salah satunya dengan uji *Durbin Waston (DW test)*. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*First Order Autocorelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* dalam model regresi dan tidak ada variabel *log* diantara variabel penjelas.

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- Bila nilai DW berada diantara d , sampai dengan $4-d$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, tidak ada autokorelasi

- Bila nilai DW lebih kecil daripada d , koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi positif.
- Bila nilai DW terletak diantara d_1 dan d_2 maka tidak dapat disimpulkan.
- Bila nilai DW lebih besar daripada $4-d_1$, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya autokorelasi negative.
- Bila nilai DW terletak antara $4-d_u$ dan $4-d_1$, maka tidak dapat disimpulkan.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, dimana masing-masing mempunyai interpretasi sebagai rata-rata perubahan yang diharapkan dalam respon Y (negative / positif) per unit perubahan dalam masing-masing variabel X disebut dengan slope. Adapun untuk menghitung a dan b digunakan program SPSS.

3.4.3 Koefisien Determinasi

Untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel independen (X_1 X_2) terhadap (Y) dapat digunakan koefisien determinasi yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

Besarnya koefisien determinasi (r^2) terletak antara 0 dan 1 atau antara 0% sampai dengan 100%. Sebaliknya jika $r^2 = 0$, model tadi tidak menjelaskan sedikitpun pengaruh variasi variabel X terhadap variasi variabel Y. Kecocokan model dikatakan lrbih baik jika r^2 semakin dekat dengan 1. Jadi untuk batas koefisien determinasi adalah $0 \leq r^2 \leq 1$

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini akan dimulai dengan penetapan hipotesis Hipotesis Operasional uji signifikan, kriteria dan penarikan kesimpulan

3.4.4.1 Penetapan Hipotesis Operasional

Penetapan Hipotesis Operasional ditentukan dengan dua cara :

a. Secara Parsial

$H_{01} : \beta_{YX_1} = 0$ Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
Negatif terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah

$H_{a1} : \beta_{YX_1} > 0$ Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif
terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

$H_{02} : \beta_{YX_2} = 0$ Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh
positif terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah.

$H_{a2} : \beta_{YX_2} > 0$ Dana Alokasi Umum berpengaruh positif
terhadap Kemandirian keuangan Daerah.

b. Hipotesis Simultan

$H_0 : \beta_{YX_1} : \beta_{YX_2} = 0$: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Alokasi Umum secara simultan tidak

berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Ha: $\beta_{YX1} : \beta_{YX2} \neq 0$: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3.4.4.2 Penetapan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% dengan tingkat kesalahan 5%. Tingkat signifikansi adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian karena dianggap cukup ketat mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.

3.4.4.3 Uji Signifikansi

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Asumsi yang dimiliki pengujian ini yaitu variable konstan. Uji t menunjukkan jauhnya pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait. Hasil uji t dengan tingkat signifikansi atau α tertentu dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance).

Prediksi variabel independen terhadap variabel dependen akan diketahui jika jumlah degree of freedom (df) sebesar 20 atau lebih dan dengan derajat kepercayaan sebesar 5%. H_0 dapat ditolak apabila

nilai t lebih besar 2 (dalam nilai absolut). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Jika nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Simultan F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

3.4.4.4 Kaidah Keputusan

a. Uji t

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probability < 0,05), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probability >0,05), maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

b. Uji F Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probability < 0,05), maka secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probability >0,05), maka secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.4.4.5 Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian di atas yang dilakukan penulis dengan analisis kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang ditetapkan dapat diterima atau ditola